

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Era Globalisasi

Prama Tusta Kesuma¹, Erin Dwi Lestari², Edy Sah Putra Tarigan³, Yerisha Afriani⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan

e-mail : ramatusta08@gmail.com¹, 21erindwil@gmail.com², edysahputrat@gmail.com³, Riani1030@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan ekonomi di era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam mekanisme transaksi, termasuk adopsi pembayaran digital seperti QRIS dan layanan pay-later. Kedua sistem ini tidak hanya mempermudah proses transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi stabilitas keuangan generasi muda karena meningkatnya konsumsi dan utang. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis dampak kedua sistem pembayaran terhadap perekonomian Indonesia dan kebutuhan regulasi hukum dalam pengendalian penggunaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang jelas diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Digitalisasi Ekonomi, Inklusi Keuangan, QRIS, Pay-later*

Abstract

The economic developments in the era of globalization have brought significant changes in transaction mechanisms, including the adoption of digital payments such as QRIS and pay-later services. These systems not only facilitate transaction processes and enhance financial inclusion but also pose challenges to the financial stability of the younger generation due to increased consumption and debt. This study uses a normative juridical method to analyze the impact of these two payment systems on the Indonesian economy and the need for legal regulation to control their use. The findings indicate that clear legal regulations are necessary to support healthy and sustainable digital economic growth.

Keywords: *Economic Digitalization, Financial Inclusion, QRIS, Pay-later.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembangunan ekonomi di era globalisasi masih menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang rumit. Globalisasi telah mengubah cara negara-negara saling berinteraksi, serta mendinamiskan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, hukum berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi, berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk berbagai aktivitas ekonomi, menciptakan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat hukum. Di era globalisasi yang ditandai dengan arus barang, jasa, dan investasi yang semakin terbuka, peran hukum sebagai alat pengatur tidak dapat diabaikan.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi signifikan untuk memanfaatkan globalisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, berbagai tantangan seperti ketidakpastian hukum, perlindungan investasi harus diatasi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pertumbuhan ekonomi yang belum secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat menjerit karena tingginya harga-harga kebutuhan pokok, pengurangan subsidi dan tingginya angka pengangguran. Tantangan-tantangan ekonomi tersebut menjadi beban bagi pemerintah Indonesia, apalagi saat ini fokus pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang kuat dan efektif menjadi syarat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi

sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara merupakan negara dengan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang khas, sehingga menjadi negara yang memberikan perspektif menarik tentang bagaimana teknologi digital berkembang. Berbicara mengenai perkembangan teknologi, tentunya telah menciptakan paradigma baru bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Di era yang semakin berkembang pada kemajuan saat ini, masyarakat bergantung pada perkembangan teknologi digital untuk mendapatkan transaksi elektronik yang cepat dan efektif. Adanya perkembangan seperti ini membuat masyarakat terhindar dari kekhawatiran dalam transaksi yang bernilai lebih besar; peredaran uang palsu; dan kegiatan kriminalitas seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan. Mekanisme pembayaran non-tunai di era digital ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah inovasi untuk mengatasi tantangan bisnis digital, yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi lebih maju dan produktif, serta mempermudah proses pembayaran.

Salah satu tren baru yang muncul dalam konteks digitalisasi ekonomi di Indonesia adalah penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan layanan *paylater*. QRIS, yaitu sistem pembayaran dengan teknologi QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menstandarisasi proses pembayaran elektronik di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan QRIS, transaksi non-tunai di Indonesia menjadi semakin luas dan efisien, memberikan manfaat bagi para pedagang mikro, kecil, menengah, dan besar, di berbagai sektor usaha, serta digunakan untuk donasi sosial keagamaan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Namun, dengan meningkatnya penggunaan QRIS, undang-undang juga perlu mengatur transaksi digital dengan lebih baik, termasuk aspek keamanan, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian sengketa di dunia maya.

Di sisi lain, layanan *pay-later* semakin diminati, terutama di kalangan generasi muda. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa dan membayarnya di kemudian hari. Meskipun menawarkan kemudahan, layanan *pay-later* juga membawa risiko utang yang tidak terkelola jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penggunaan *pay-later* perlu segera diterapkan untuk melindungi konsumen. Hukum harus memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen dan memastikan bahwa penyedia layanan *pay-later* bertindak transparan dan bertanggung jawab, termasuk kewajiban untuk menjelaskan suku bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Pentingnya peran hukum dalam pembangunan ekonomi juga terlihat dari upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk sistem hukum yang efektif yang mengatur pembayaran secara digital dan tantangan lain yang dihadapi adalah menyesuaikan regulasi domestik dengan standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional dalam bidang perekonomian.

Layanan *pay-later* yang semakin populer di Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong ekonomi digital. Meskipun layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, pertumbuhan penggunaan *pay-later* juga membawa tantangan tersendiri, seperti meningkatnya risiko konsumsi berlebihan terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, perkembangan pesat layanan pembayaran digital lainnya, seperti QRIS, menunjukkan bagaimana teknologi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, diperlukan peran hukum yang lebih aktif dalam mengatur dan melindungi pengguna layanan ini. Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang jelas untuk memastikan keamanan data, melindungi hak-hak konsumen, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah kemajuan teknologi. Keberadaan sistem hukum yang efektif dan regulasi yang tepat dapat menjadi fondasi penting untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat Indonesia di era digitalisasi ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan *judicial review* yaitu metode normatif merupakan metode pendekatan yuridis normatif, jenis dan sumber data yang

digunakan adalah data sekunder dimana pengumpulan data dilakukan terutama dengan teknik *study document library research and online research* dengan mengintegrasikan data sekunder yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, kemudian melakukan penelusuran dan sinkronisasi antar bahan hukum yang dibutuhkan dalam karya tulis ini.

Bahan hukum primer yang digunakan sendiri merupakan peraturan perundang-undangan dan peran hukum dalam menghadapi permasalahan yang diangkat pada identifikasi masalah pada karya tulis ini setelah itu mencangkup bahan hukum sekunder juga berupa berbagai buku dan jurnal yang dimuat dalam sebuah permasalahan yang diambil pada kasus ini lalu bahan hukum tersier yang digunakan juga berasal dari internet seperti website yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan data pendukung lainnya yang mendukung pencarian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penggunaan Qris Di Era Globalisasi

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat dan maju. Dalam konteks globalisasi, berbagai aspek kehidupan mulai bertransformasi ke arah digital yang menyebabkan pergeseran dari ekonomi tradisional ke ekonomi digital. Untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, uang digunakan sebagai alat. Namun, sistem pembayaran telah mengalami banyak kemajuan, dan peran uang tunai telah beralih ke bentuk non-tunai (Harahap, 2021). Kehadiran uang elektronik diawali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 dan Nomor 16/8/PBI/2014, sebagai bagian dari upaya Bank Indonesia untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*). Hal ini menjadi titik awal kemunculan uang elektronik yang memenuhi kebutuhan akan alat pembayaran yang cepat, mudah, dan dapat diakses di mana saja.

Salah satu dampak utama dari implementasi QRIS adalah peningkatan inklusi keuangan. Di era globalisasi ini, akses terhadap layanan keuangan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. QRIS, sebagai sebuah inovasi dalam pembayaran digital, menawarkan berbagai peluang yang dapat membantu masyarakat untuk berkembang dan beradaptasi dengan dunia digital saat ini. Indonesia, dengan jumlah UMKM yang sangat besar, memiliki potensi yang signifikan untuk memanfaatkan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonominya.

Di era digital, batas-batas geografis semakin kabur. Kebiasaan konsumen dalam berbelanja, mencari informasi, dan melakukan transaksi telah berubah, dengan preferensi yang kuat terhadap metode pembayaran non-tunai. Dengan mengadopsi QRIS, diharapkan UMKM dapat lebih efektif menjangkau segmen konsumen ini. Selain itu, sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pelanggan mereka di luar wilayah geografis tradisional mereka, membuka peluang pasar yang lebih luas. Penggunaan QRIS membuat transaksi menjadi lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manual yang dapat terjadi pada sistem pembayaran konvensional. Fitur pencatatan otomatis yang ada pada beberapa sistem QRIS juga membantu UMKM dalam mengelola dan memonitor keuangan mereka dengan lebih mudah.

Selain itu, QRIS memberikan manfaat bagi semua bisnis, baik besar maupun kecil. Dengan teknologi ini, para pelaku usaha dapat memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak pelanggan yang lebih menyukai pembayaran non-tunai. Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan peningkatan penggunaan pembayaran digital, di mana konsumen cenderung menyukai transaksi yang cepat dan praktis. Dalam konteks ini, QRIS tidak hanya mempercepat proses transaksi tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kepuasan dan loyalitas mereka.

Kode QR telah dibuat dan digunakan di banyak hal, seperti sistem transfer uang dan dompet elektronik. Pada akhirnya, penerapan QRIS oleh Sovereigns akan memungkinkan pelanggan melakukan pembelian non-tunai dengan mempercepat pembayaran digital. Penjualan barang ke toko meningkat sebagai hasil dari transaksi digital (Supriyanto, 2021). QRIS dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan beberapa cara, seperti:

- Dukungan untuk UMKM: Dengan QRIS, bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat menerima pembayaran tanpa menghabiskan banyak uang untuk perangkat keras.
- Peningkatan konsumsi: Konsumsi domestik meningkat sebagai hasil dari kemudahan transaksi QRIS, yang merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi.
- Pengurangan inflasi: QRIS membantu Bank Indonesia mengendalikan peredaran uang dan inflasi dengan mengurangi penggunaan uang tunai.
- Akses pembiayaan: Proses mendapatkan modal bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat dipermudah dengan data transaksi QRIS sebagai dasar untuk menentukan kredit.

Dalam konteks globalisasi, QRIS juga memungkinkan Indonesia untuk berintegrasi lebih baik dengan sistem pembayaran internasional. Di dunia yang semakin terhubung, kemampuan untuk melakukan transaksi lintas negara dengan cepat dan efisien sangat penting. QRIS bisa berfungsi sebagai jembatan bagi pelaku bisnis Indonesia untuk terhubung dengan pasar global, mempermudah transaksi internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, QRIS tidak hanya memberikan kontribusi pada ekonomi lokal, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Namun, dibalik manfaatnya, ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal keamanan transaksi digital. Meningkatnya penggunaan QRIS berpotensi meningkatkan risiko penipuan dan kejahatan siber. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak penyedia layanan, pengguna, dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai keamanan siber. Edukasi tentang cara bertransaksi secara aman dengan QRIS perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, pembayaran QRIS perlu dipertimbangkan kembali agar dianggap sebagai materi yang valid untuk memungkinkan masa depan kehidupan dengan menggunakan teknologi yang terus tumbuh dan berkembang.

Keberhasilan QRIS bergantung pada kebijakan yang mendukung keamanan, inklusi, inovasi, perlindungan konsumen, dan kelestarian lingkungan. Pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai visi pembayaran digital yang efisien, aman, dan merata di seluruh negeri. Indonesia memiliki kemampuan untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dengan menerapkan kebijakan yang bijaksana dan kerja sama yang kuat. Infrastruktur teknologi yang mendukung QRIS sangat penting untuk keberhasilannya, sehingga kebijakan harus mencakup rencana untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang canggih di seluruh Indonesia. Jika para pelaku ekonomi kreatif menggunakan uang elektronik untuk melakukan transaksi luring dan daring, mereka dapat yakin bahwa mereka akan aman dari penipuan dan pencurian uang palsu.

Adopsi QRIS juga perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Di beberapa daerah, masih terdapat tantangan terkait akses internet yang stabil dan cepat, yang menjadi syarat transaksi berbasis QRIS. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta harus bekerja sama untuk memastikan infrastruktur digital dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Tanpa infrastruktur yang memadai, manfaat QRIS tidak akan dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Penggunaan QRIS secara luas juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, pemantauan aliran uang menjadi lebih mudah. Hal ini dapat membantu pemerintah meminimalisir kebocoran pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Di era globalisasi, di mana persaingan antar negara semakin ketat, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengaruh QRIS di era globalisasi sangat luas dan beragam. Mulai dari meningkatkan inklusi keuangan, mendukung inovasi bisnis, hingga memperbaiki sistem perpajakan, QRIS memainkan peran penting dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, seperti keamanan dan infrastruktur, potensi manfaat yang ditawarkan QRIS jauh lebih besar. Dengan pendekatan yang tepat dari semua pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, QRIS dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era globalisasi.

QRIS bukan hanya sekedar solusi pembayaran, tetapi juga merupakan langkah menuju transformasi digital yang lebih besar di Indonesia.

Penggunaan pay-later dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat

Layanan pay-later telah menjadi salah satu alternatif transaksi finansial yang semakin populer di Indonesia. Konsep ini memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran hingga beberapa waktu setelah transaksi dilakukan, menjadikannya serupa dengan kredit instan. Berdasarkan data dari analisis transaksi online dan offline lebih dari dua juta pengguna Kredivo di 34 provinsi pada tahun 2023, serta survei online terhadap hampir 7.000 responden pada 10 Maret hingga 7 April 2024, terlihat bahwa layanan ini semakin diminati oleh masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke kartu kredit atau layanan perbankan tradisional.

Salah satu faktor pendorong utama popularitas pay-later, seperti Shopee Pay-Later, adalah kemudahan akses dan proses yang lebih cepat dibandingkan pembuatan kartu kredit. Pengguna cukup melakukan verifikasi identitas dengan foto diri dan KTP untuk dapat mengakses layanan ini. Berbeda dengan kartu kredit yang memerlukan proses verifikasi lebih kompleks dan melibatkan analisis kelayakan kredit mendalam, layanan pay-later memberikan solusi cepat bagi masyarakat, terutama generasi muda, dalam memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari. Hal ini menarik perhatian masyarakat yang tidak memiliki riwayat kredit formal atau kesulitan memenuhi syarat perbankan tradisional.

Pay-later juga berperan dalam meningkatkan fleksibilitas keuangan bagi generasi muda. Mereka dapat menggunakan layanan ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier, tanpa harus memiliki uang tunai pada saat transaksi berlangsung. Dengan adanya opsi pembayaran secara angsuran, pengguna dapat mengelola pengeluaran secara lebih terencana. Misalnya, generasi muda sering memanfaatkan layanan ini untuk membeli kebutuhan seperti pakaian, gadget, atau bahkan produk digital seperti tiket dan layanan streaming. Hal ini sejalan dengan pola konsumsi baru yang berkembang di kalangan masyarakat urban Indonesia, di mana kemudahan dan kecepatan menjadi faktor utama dalam memilih metode pembayaran.

Pay-later memanfaatkan inovasi teknologi dan data untuk menilai profil risiko pengguna secara cepat. Teknologi ini memungkinkan pemberi layanan untuk menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman dengan lebih efisien. Dengan sistem penilaian risiko yang berbasis data, pengguna yang tidak memiliki skor kredit formal masih dapat memperoleh akses ke fasilitas pinjaman, asalkan transaksi sebelumnya menunjukkan riwayat pembayaran yang baik. Di sisi lain, layanan ini juga memberikan keuntungan bagi penyedia layanan dalam bentuk bunga atau biaya administrasi yang dibebankan pada angsuran bulanan pengguna.

Pertumbuhan layanan pay-later juga berdampak positif pada ekonomi digital Indonesia. Pay-later mendorong peningkatan transaksi di platform *e-commerce* karena pengguna merasa lebih nyaman berbelanja dengan pembayaran yang dapat ditunda. Hal ini membantu bisnis kecil hingga besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Pada masa pandemi COVID-19, misalnya, ketika masyarakat lebih banyak berbelanja secara online, layanan pay-later menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan sektor *e-commerce* di Indonesia. Dampak positif ini berlanjut hingga saat ini, dimana adopsi pay-later semakin meluas, tidak hanya untuk belanja online tetapi juga untuk transaksi offline di toko ritel atau pusat perbelanjaan.

Popularitas pay-later juga menimbulkan tantangan tersendiri. Terdapat risiko konsumsi berlebihan di kalangan pengguna, terutama generasi muda, yang sering kali tidak memperhitungkan kemampuan membayar angsuran di masa mendatang. Penundaan pembayaran ini dapat membuat pengguna terjebak dalam pola hutang berulang jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, edukasi literasi finansial sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan layanan ini.

Secara keseluruhan, layanan pay-later memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan memudahkan akses kredit bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional, layanan ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal. Namun, keberlanjutan manfaat ini sangat bergantung pada pengelolaan risiko dan edukasi keuangan yang

memadai, agar penggunaan layanan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

Dampak Ekonomi yang dihasilkan dalam Kemajuan Teknologi

Seiring perkembangan zaman, manusia tak dapat menolak gaya kehidupan yang baru termasuk kemajuan teknologi dalam dunia perekonomian dari bentuk transaksi yang awalnya memiliki bentuk fisik namun saat ini sudah tidak perlu karena terdapat bentuk transaksi digital, perkembangan teknologi sendiri membawa dampak yang sangat besar dalam penggunaan kebiasaan yang berawal dari adanya teknologi dari media penjualan berbasis *online* saat ini sangat memudahkan masyarakat dari penjuru dunia untuk membeli barang-barang dari sebuah tempat yang jauh dari tempatnya berada, tentunya saja perubahan ini membawa dampak tersendiri baik secara menguntungkan maupun merugikan bagi jalur perekonomian suatu negara, salah satu dampak buruk yang terjadi adalah kurangnya kesadaran generasi muda untuk melakukan perhitungan dalam penggunaan finansial keuangan di tambah dengan kemudahan yang telah diberikan oleh platform baik itu penggunaan pembayaran digital seperti QRIS maupun pay-later, tentunya saja perubahan bentuk dalam mekanisme pembayaran tersebut sangat mempengaruhi sebuah karakter tersendiri pada generasi muda, dimana penggunaan *Quick Response Code Indonesia standard* atau yang biasa dikenal dengan QRIS memiliki dampak yang sangat signifikan di bidang pembayaran yaitu dengan mempermudah pembayaran secara digital mendorong minat orang-orang dalam melakukan transaksi secara digital tentu saja perubahan ini sangat membantu kenaikan perekonomian di sebuah negara, selain itu penggunaan QRIS dalam prakteknya saat ini sangat membantu dalam pendataan keuangan atau *bookkeeping* dalam manajemen keuangan dan dapat membantu memajukan usaha kecil perdagangan secara global dikarenakan sistem bayar secara digital mempermudah dalam transaksi jual beli, yaitu dalam kemudahan dalam melakukan transaksi tentu saja bentuk pembayaran digital yang satu ini sangat membantu peningkatan perekonomian secara sekala besar dari sebuah negara. namun berbeda dengan QRIS belum lama ini juga terdapat tren menggunakan pay-later pengaplikasian pembelian bayar dengan metode beli sekarang dan bayar nanti, karena kemudahan pay-later ini tak jarang generasi muda jadi tidak stabil dalam finansial keuangan, menurut hasil riset data banyak generasi muda yang memiliki sifat konsumtif akan adanya penggunaan media pembayaran secara Pay-later. selain itu pada saat ini tak jarang generasi muda yang sudah memiliki banyak piutang dikarenakan kebutuhan ataupun sebenarnya hanya keinginan semata, maka dari itu sebenarnya tak jarang perilaku konsumtif ini sangat merugikan generasi muda dalam manajemen *finansial* keuangan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa piutang pembiayaan produk pay-later atau buy now pay later (BNPL) sebesar Rp5,54 triliun pada Januari 2024, data OJK menunjukkan bahwa piutang pembiayaan BNPL meningkat 21,66% secara signifikan di setiap tahunnya dibandingkan periode sebelumnya yang hanya Rp4,56 triliun. Alhasil, total piutang pembiayaan adalah 1,17% pada Januari 2024. Tentunya saja hasil dari data tersebut terlihat dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam penggunaan pay-later pada setiap tahunnya terus akan bertambah jika tidak segera melakukan pencegahan dengan upaya hukum.

Tentu saja dalam perubahan ini, hukum harus berperan aktif secara lebih lanjut dalam melindungi keamanan data diri warganya maupun sistem perekonomian maka dari itu diperlukannya sebuah regulasi hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan sistem pembayaran digital lainnya seperti QRIS dan Pay-later, karena pada dasarnya pembangunan ekonomi bergantung pada hal-hal penting seperti prediktabilitas, kapasitas prosedural, sistematisasi tujuan, keseimbangan fasilitas, dan definisi status. Maka dari itu pemerintah harus membangun regulasi secara jelas yang mengatur mengenai seluruh pembayaran digital baik itu di bawah naungan Bank Indonesia maupun OJK lalu pemerintah harus lebih mengawasi secara ketat dan mempersulit dalam pembuatan dengan sistem pembayaran dengan metode pay-later ini agar sistem ini tidak menghambat pembangunan perekonomian negara.

SIMPULAN

Perubahan bentuk dalam globalisasi membawa perkembangan yang sangat besar bagi perekonomian di setiap wilayahnya termasuk Indonesia sebagai perkembangan perekonomian tercepat di Asia Tenggara, tentu saja ini menambah warna baru dalam sistem perekonomian, dengan kemudahan dalam pembayaran transaksi digital yaitu dengan sistem pembayaran menggunakan QRIS dan Pay-Later selain itu semenjak adanya sistem pembayaran tersebut penyebaran perekonomian dirasa lebih baik bagi para masyarakat luas dan tentu saja kedua sistem sangat mempermudah generasi muda dalam pengaplikasiannya. Namun, dibalik manfaat tersebut terdapat masalah tersendiri yang harus dihadapi yaitu dengan adanya kedua pembayaran tersebut generasi muda tak jarang menjadi buta dalam mengatur *financial* keuangan dan maraknya kasus kejahatan siber tentu saja keadaan tersebut sangat membahayakan perekonomian Indonesia dalam mempraktikkannya maka dari itu tentu saja diperlukan regulasi hukum yang benar-benar mengatur mengenai penggunaan dan pembatasan dalam inovasi pembayaran digital tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, Wildan dkk, "Pengaruh Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Terhadap Kepuasan Nasabah", *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship* Vol 1 No 2 Tahun 2023 hal. 95.
- Anggraeni rika, "Pengguna 'Paylater' Terus Meningkat, Tembus Rp5,54 Triliun Januari 2024", 20 Maret 2024, Tersedia di [BisnisIndonesia.id](https://bisnisindonesia.id), Pengguna 'Paylater' Terus Meningkat, Tembus Rp5,54 Triliun Januari 2024, diakses pada 30 Oktober 2024
- Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). (2024). Laporan Pertumbuhan E-Commerce Pasca Pandemi.
- Asosiasi E-Commerce Indonesia, (2024). Laporan Pertumbuhan E-Commerce Pasca Pandemi. Tersedia di <https://www.idea.or.id/Laporan-Pertumbuhan-E-Commerce-Pasca-Pandemi>, diakses pada 6 Oktober 2024.
- Bank Indonesia. (2023). Inovasi Finansial dan Risiko Kredit Digital, Tersedia di <https://www.bi.go.id> Inovasi Finansial dan Risiko Kredit Digital. diakses pada 10 Oktober 2024.
- Bank Indonesia. (2023). Inovasi Finansial dan Risiko Kredit Digital.
- Damayanti Alfina, 2023, PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF, Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Darwiyani, Amelia Putri dkk, "Fenomena Penggunaan QRIS dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Menuju Indonesia Emas 2045" Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
- Dr. Sugiarto Agus, Laporan Perilaku Konsumen e-Commerce Indonesia 2023: Pemulihan Ekonomi dan Tren Belanja Pasca Pandemi Juni 2023, (Jakarta: kredivocorp.com)
- Feronica Simanjorang, Achmad Fattahillah,dkk. (2023). "Globalisasi Dan Lingkungan Ekonomi Di Indonesia: Sebuah Analisis Tentang Dampak Dan Tren". *Jurnal Riset Manajemen*, vol 1 no 2, hal 30–40.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Tren Digital dan Pola Konsumsi Generasi Muda. Terdapat di <https://kominfo.go.id/> Tren Digital dan Pola Konsumsi Generasi Muda, diakses pada 29 November 2024.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Tren Digital dan Pola Konsumsi Generasi Muda.
- Listiyono, Hersatoto dkk, "Dinamika Implementasi QRIS: Meninjau Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia", *IKRAITH-INFORMATIKA* Vol 8 No 2 Juli 2024, hal. 121-123.
- Natsir, Khairina dkk, "PENGGUNAAN QRIS SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM", *Jurnal Serina Abdimas*, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, hal. 1155.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Pentingnya Literasi Keuangan di Era Digital.
- Otoritas Jasa Keuangan, Pentingnya Literasi Keuangan di Era Digital. Tersedia di [\[ojk.go.id\]\(https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Gelar-Edukasi-Kuangan-Digination-Mahasiswa-di-Makassar/SP%20Pentingnya%20Peningkatan%20Literasi%20Keuangan%20Digital%2c%2](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-Gelar-Edukasi-Kuangan-Digination-Mahasiswa-di-Makassar/SP%20Pentingnya%20Peningkatan%20Literasi%20Keuangan%20Digital%2c%2)

00JK%20Gelar%20Edukasi%20Keuangan%20Mahasiswa%20di%20Makassar.pdf).Di akses pada 30 November 2024

- Pranoto, Edi, "PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018, hal 91.
- Putri, Sulistiani Arianti dan Dhidhin Noer Ady Rahmanto, "Analisis Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Alat Pembayaran Non Tunai pada Bank Syariah Indonesia KCP Godean 2", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2024, hal. 457.
- Salehudin Imam, "Apa itu QRIS? Apa manfaat dan tantangan penggunaan QRIS di Indonesia?", Tersedia di <https://theconversation.com/apa-itu-qr-is-apa-manfaat-dan-tantangan-penggunaan-qr-is-di-indonesia-205288>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.
- Shopee. (2024). Penggunaan Shopee Pay-Later dan Perilaku Konsumen. Tersedia di <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/> Penggunaan Shopee Pay-Later dan Perilaku Konsumen. diakses pada 30 November 2024.
- Website Bank Indonesia, "Ekonomi Digital Terus Tumbuh, QRIS Tembus 12 Juta Merchant Siaran Pers", Tersedia di https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2328621.aspx#:~:text=Sejak%201%20November%202021%2C%20jumlah%20merchant%20QRIS%20telah,telah%20dicanangkan%20BI%20bersama%20Industri%20pada%20Februari%202021, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024.